

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kestabilan di suatu negara mencakup berbagai aspek yang harus dikelola dengan baik, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Di Indonesia, salah satu tantangan besar dalam menjaga kestabilan ini adalah pengelolaan sampah, yang belum terkelola secara maksimal. Berdasarkan data SIPSN, jumlah timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 34,9 juta ton dengan capaian persentase pengelolaan sampah yang belum optimal.¹ Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sampah di Indonesia belum tertangani secara efektif. Dari total timbulan tersebut, hanya sekitar 33,09% atau 11,57 juta ton per tahun sampah yang berhasil dikelola melalui kegiatan pengurangan dan penanganan, sedangkan 66,91% atau sekitar 23,39 juta ton per tahun masih tergolong tidak terkelola.

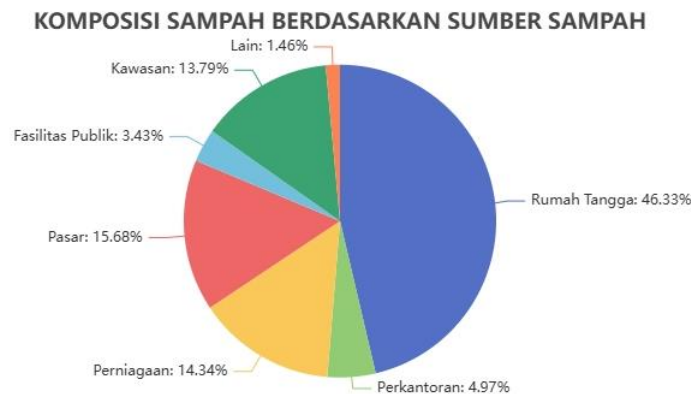
Data capaian kinerja pengelolaan sampah tahun 2024 yang dihimpun dari 329 kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan gambaran umum mengenai kondisi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di tingkat nasional. Berdasarkan data SIPSN, total timbulan sampah nasional mencapai 34.969.723,79 ton per tahun, yang mencerminkan tingginya volume sampah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga dan sektor terkait di seluruh wilayah Indonesia. Dari total timbulan tersebut, capaian pengurangan sampah tercatat sebesar 1,39% atau setara dengan 486.053,59 ton per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa inisiatif pengurangan sampah dari sumbernya,

¹ SIPSN. 2024. *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah 2024*. Diakses dari <https://sipsn.menlhk.go.id/>

yaitu upaya pembatasan timbulan, penggunaan ulang, dan daur ulang berada pada tingkat yang relatif rendah.

Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mengklasifikasikan sumber timbulan sampah menjadi 6 bagian, sampah kawasan, sampah fasilitas publik, sampah pasar, sampah perniagaan, sampah rumah tangga, dan sampah lain.²

Gambar 1.1
Diagram Sumber Timbulan Sampah Nasional Tahun 2024



Sumber: SIPSN KLHK sumber timbulan sampah, 2024

Berdasarkan Gambar 1.1, sampah rumah tangga menjadi sumber penyumbang timbulan sampah terbesar yang ada di Indonesia, yaitu sebesar 46,33% dari keseluruhan sampah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan lingkungan di Indonesia. Sampah yang tidak dikelola dengan baik terutama di tingkat rumah tangga, dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari pencemaran lingkungan hingga ancaman terhadap

² SIPSN. 2024. *Sumber Timbulan Sampah 2024*. Diakses dari <https://sipsn.menlhk.go.id/>

kesehatan masyarakat. Sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran air, karena limbah organik dan anorganik seringkali berakhir di saluran air atau sungai. Hal ini mengakibatkan kualitas Ph air menurun dan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi maupun digunakan sehari-hari. Selain itu, penumpukan sampah juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, seperti bau tidak sedap dan pemandangan yang tidak enak dilihat. Lebih parah lagi, sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang penyakit, meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti infeksi, diare, dan penyakit yang dibawa oleh vektor seperti lalat dan nyamuk.³ Untuk mencegah dampak yang berbahaya bagi masyarakat, pemerintah yang berwenang harus mengupayakan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Sampah rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di dalam rumah tangga, termasuk sisa makanan, kemasan, dan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2012, sampah rumah tangga didefinisikan sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, namun tidak mencakup tinja dan limbah spesifik lainnya.⁴ Jenis-jenis sampah rumah tangga dikelompokkan menjadi sampah organik yang mudah terurai seperti sisa makanan dan limbah taman; sampah anorganik yang tidak mudah terurai seperti plastik dan logam; serta limbah berbahaya dan beracun (B3) seperti baterai bekas dan kemasan bahan kimia.

³ Hasibuan, Rosmidah.2016. *Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*. Labuhanbatu: Jurnal Ilmiah Advokasi.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga* (PP No. 81 Tahun 2012). Halaman 1-2.

Pemerintah memiliki komitmen dalam mengatasi permasalahan sampah yang diwujudkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas), pemerintah menargetkan pengurangan timbulan sampah hingga 30% pada tahun 2025 dan peningkatan pengelolaan sampah sebesar 70%.⁵ Terutama untuk mengatasi permasalahan terbesar yaitu sampah rumah tangga yang belum dikelola dengan baik. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dimaksud dalam peraturan ini terutama mencakup sampah rumah tangga dan sampah lain yang sejenis, yang berasal dari aktivitas rumah tangga, komersial, industri kecil, fasilitas umum, dan sumber-sumber sejenis lainnya.⁶

Gambar 1.2
Jumlah timbulan sampah nasional setiap tahun



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

⁵ Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

⁶ Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Diketahui dari Gambar 1.2, data timbulan sampah nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tren kenaikan ini terlihat jelas sejak tahun 2019 hingga 2023, Terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan dalam volume sampah, terutama setelah tahun 2021. Meskipun terdapat sedikit penurunan dari 27,6 juta ton pada tahun 2019 menjadi 27,5 juta ton pada tahun 2020, pada tahun-tahun berikutnya, jumlah timbulan sampah meningkat tajam. Khususnya dari tahun 2021 ke 2022, terdapat lonjakan sebesar 10 juta ton, yang merupakan peningkatan terbesar selama periode tersebut.⁷ Peningkatan volume sampah yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah tahun 2021, diikuti dengan meluapnya daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA) tidak terkecuali di D.I.Yogyakarta.

Berdasarkan data SIPSAN, D.I.Yogyakarta memiliki jumlah timbulan sampah dengan total 708,359.03 ton sampah pertahun.⁸ Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional Piyungan di Bantul, yang menjadi TPA regional menerima 700 ton sampah perharinya dari Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Dengan jumlah tersebut, pada tahun 2022 TPA Piyungan tidak dapat menampung sampah lagi atau *overload*.⁹ Akhirnya dikeluarkan Surat edaran oleh Sekertaris Daerah mengenai penutupan pelayanan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, yang mulai berlaku sejak 23 Juli 2023.¹⁰ Seiring pelaksanaan penutupan TPA Piyungan diberlakukan sistem buka tutup

⁷ SIPSAN. 2023. *Timbulan Sampah*. Diakses dari <https://sipsn.menlhk.go.id/> pada 26 September 2024 pukul 13.07.

⁸ SIPSAN. (2024). *Timbulan Sampah*. Diakses dari <https://sipsn.menlhk.go.id/> pada 26 September 2024 pukul 13.25.

⁹ Yosef leon. (2024). TPA Piyungan Ditutup Permanen Besok! Semua Depo Sampah Kota Jogja Hari Ini Dikosongkan. *Harian Jogja*. Diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/04/30/510/1172965/tpa-piyungan-ditutup-permanen-besok-semua-depo-sampah-kota-jogja-hari-ini-dikosongkan> pada 28 Agustus 2025 pukul 01.42 WIB.

¹⁰ Sekertariat Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). Penutupan Pelayanan Regional TPA Piyungan.

sementara karena daya tampung yang sudah penuh, dan akhirnya ditutup secara permanen pada 1 Mei 2024.¹¹

Dalam menangani permasalahan sampah yang *overload*, Pemerintah D.I.Yogyakarta menetapkan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah. Berdasarkan Surat Gubernur Nomor 658/11898 tahun 2023 setiap kabupaten/kota di wilayah DIY diharuskan untuk mengelola sampah secara mandiri. Sebelum terbitnya Surat Gubernur tersebut, proses pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul tersentralisir dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta. Desentralisasi pengelolaan sampah melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan partisipasi lokal, mengurangi beban pemerintah pusat, dan mendukung keberlanjutan pengelolaan.¹² Sehingga di masing-masing pemerintah daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman berpacu untuk membuat kebijakan serta program untuk menangani isu pengelolaan sampah.

Sebelum ditetapkannya kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah terlebih dahulu menginisiasi adanya program Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA). Pada 12 Desember 2022 diterbitkan Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 Tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mengelola sampahnya sendiri yang ditimbulkan dari aktivitasnya sehari-hari.¹³ Dengan adanya program ini,

¹¹ Wisang Seto Pangaribowo, Teuku Muhammad Valdy Arief. (2022). Sudah "Overload", TPA Piyungan Tak Bisa Lagi Tampung Sampah pada Akhir 2022". dari <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/05/17/175249778/sudah-overload-tpa-piyungan-tak-bisa-lagi-tampung-sampah-pada-akhir-2022?page=all>. Berita Kompas. Diakses pada 29 Agustus 2025 pukul 1.38 WIB.

¹² Hadiwinata, B. S. (2006). *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Gadjah Mada University Press.

¹³ Surat Edaran Walikota Yogyakarta. (2022) Gerakan Zero Sampah Anorganik.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah mengalami perubahan dalam bentuk Perda Nomor 1 tahun 2022. Program Gerakan Zero Sampah Anorganik bertujuan untuk meminimalisir volume timbulan sampah yang nantinya disetorkan ke TPA Piyungan.¹⁴ Program ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan pengurangan sampah anorganik di Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menginisiasi program *Organikkan Jogja* sebagai program lanjutan dari GZSA yang menitikberatkan pada pengelolaan sampah organik sejak dari sumbernya. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, khususnya dalam memilah dan mengolah sampah organik di tingkat rumah tangga.¹⁵

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Perda tersebut lalu dikeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2024 mewajibkan pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai seperti kantong belanja di berbagai lokasi, termasuk kantor, tempat usaha, fasilitas umum, dan area permukiman. Aturan ini bertujuan menekan timbulan sampah dan mendorong masyarakat

¹⁴ Dinas Lingkungan Hidup. (2023). Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 Tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik. Diakses dari <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/detail/index/363> pada 27 Agustus 2025 Pukul 03.09 WIB

¹⁵ Portal Berita Pemkot Yogyakarta. (2024). Organikkan Jogja Komitmen Warga Selesaikan Sampah dari Rumah.

serta pelaku usaha beralih ke alternatif ramah lingkungan, seperti tas belanja guna ulang dan wadah makan/ minum pribadi.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2024, diterbitkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 100.34/2783 tahun 2025 tentang Program Masyarakat Jogja Olah Sampah atau disingkat Mas JOS, oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dalam program Mas JOS tidak berhenti pada segmen objek pengelolaan sampah, masyarakat sebagai subjek penghasil produksi sampah turut diberdayakan untuk mengurangi volume sampah yang disetorkan ke depo-depo sampah sejak dari rumah. Program Mas JOS bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui edukasi dan partisipasi aktif dari sumbernya, yaitu masyarakat dalam mengolah sampah anorganik di bank sampah dan sampah organik di rumah.¹⁶

Berdasarkan SE Walikota Kota Yogyakarta Nomor 100.34/2783 tahun 2025, masyarakat dan pemangku kepentingan diinstruksikan untuk melaksanakan lima langkah Mas Jos, yaitu:

1. Pilah sampah sesuai jenis; dengan memilah sampah dari sumber sampah sesuai dengan jenisnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik dengan lebih detail untuk memaksimalkan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali;

¹⁶ Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. (2025). Lewat MAS JOS Setiap Rumah Tangga Harus Kelola Sampah. Diakses melalui <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/42232#:~:text=Pihaknya%20menegaskan%20setiap%20unit%20rumah,ke%20bank%20sampah%20maupun%20pengepul>. Pada 27 Agustus 2025 pukul 04.20 WIB.

2. Sampah anorganik ke bank sampah; sampah anorganik yang telah dipilah secara detail dan memiliki nilai ekonomis disalurkan kepada Bank Sampah Unit yang tersebar di setiap RW;
3. Olah sampah organik; sampah organik diolah menggunakan berbagai metode komposting atau disalurkan kepada mitra pengolah sampah organik;
4. Habiskan makanan; mengurangi adanya sampah makanan atau food waste dengan bijak dalam mempersiapkan kebutuhan dan konsumsi pangan;
5. Gunakan wadah berulang; menghindari timbulan sampah baru dengan menggunakan wadah yang dapat digunakan secara berulang

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyebaran informasi dan pelaksanaan Program Mas JOS, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan pembagian peran yang terstruktur di berbagai tingkat kelembagaan. Program ini menekankan kolaborasi lintas pihak mulai dari instansi pemerintah, komunitas kreatif, hingga unsur masyarakat di tingkat kelurahan.

Pertama, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta berperan sebagai koordinator utama dalam penyampaian informasi Program Mas JOS. DLH bekerja sama dengan Forum Bank Sampah Kota, Shind Jogja dan Mataram Content Creator Community, serta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Yogyakarta. Sinergi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan sosialisasi program hingga ke tingkat kelurahan melalui pendekatan yang informatif, kreatif, dan memberdayakan masyarakat.

Kedua, Mantri Pamong Praja memiliki tanggung jawab dalam memastikan implementasi Program Mas JOS berjalan dengan efektif di wilayah masing-masing. Peran mereka mencakup koordinasi dan supervisi

pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan kepada Wali Kota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Dengan demikian, pengawasan dan tindak lanjut pelaksanaan program dapat berjalan secara sistematis dan terpantau.

Ketiga, Lurah memiliki peran strategis sebagai pelaksana teknis utama di lapangan. Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan lima langkah Mas JOS di tingkat RT, RW, Kampung, dan Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas ini, Lurah berkoordinasi dengan Forum Bank Sampah Kelurahan, PKK Kelurahan, dan LPMK melalui pembentukan Kader Mas JOS yang berasal dari unsur Pengurus RW, Pengurus Bank Sampah Unit, dan Pengurus PKK. Para kader ini menjalankan tugas sosialisasi, monitoring, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Mas JOS, termasuk pelaku usaha seperti pedagang kaki lima, minimarket, hotel, maupun rumah kost di wilayahnya masing-masing. Selain itu, mereka juga membantu pengawasan terhadap transporter atau penggrobak sampah, serta menjalin kerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa guna memastikan pelaksanaan program berjalan tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Program Mas JOS oleh Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki indikator-indikator yang menjadi determinasi capaian keberhasilan program. Mas JOS dirancang sebagai upaya sistematis untuk mendorong perubahan perilaku mendasar, khususnya dalam kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Keberhasilan program ini memiliki tolok ukur yang jelas, setiap kelurahan ditargetkan harus mampu mengurangi volume sampah minimal 20 persen dari jumlah yang dilaporkan sebelumnya.¹⁷ Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Yogyakarta mengadopsi model kolaborasi pentahelix dan

¹⁷ Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. (2025). Mas Jos Ajak Warga Terbiasa Pilah Sampah Dari Rumah..

bekerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari forum bank sampah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas lingkungan, hingga para konten kreator untuk menyebarkan informasi dan memengaruhi gaya hidup masyarakat. Selain sosialisasi yang masif, juga akan dilakukan monitoring dan pendampingan yang konsisten, memastikan bahwa proses pengolahan sampah benar-benar dijalankan secara berkelanjutan oleh warga.¹⁸

Meski dengan adanya berbagai program yang inovatif, Kota Yogyakarta memiliki permasalahan yang kompleks dalam mengelola permasalahan sampah. Dengan total jumlah penduduk per tahun 2024 sejumlah 461.225 jiwa dan luas wilayah 32,5 km²,¹⁹ produksi sampah di Kota Yogyakarta menjadi penyumbang sampah terbesar di TPA Piyungan pada tahun 2022 yaitu sejumlah 303,13 ton per hari.²⁰ Permasalahan tersebut menjadi isu yang nyata yang terjadi di salah satu kemantren di Kota Yogyakarta, tepatnya di Kemantren Umbulharjo.

Kemantren Umbulharjo merupakan Organisasi Perangkat Daerah setingkat kecamatan di bawah pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Yogyakarta. Istilah kemantren merupakan hasil perubahan penyebutan kecamatan menjadi kemantren pada tahun 2020 yang berlandaskan pada UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.²¹

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kemantren

No	Kemantren	Luas Area (Km2)	Jumlah
1	Tegalrejo	2,961	37486
2	Jetis	1,721	27016

¹⁸ Ibid

¹⁹ BPS Kota Yogyakarta. (2024). Hari Bhumi. diakses dari <https://jogjakota.bps.go.id/id/news/2024/04/22/32/hari-bumi.html> pada 27 Agustus 2025 pukul 05.07 WIB

²⁰ Ibid

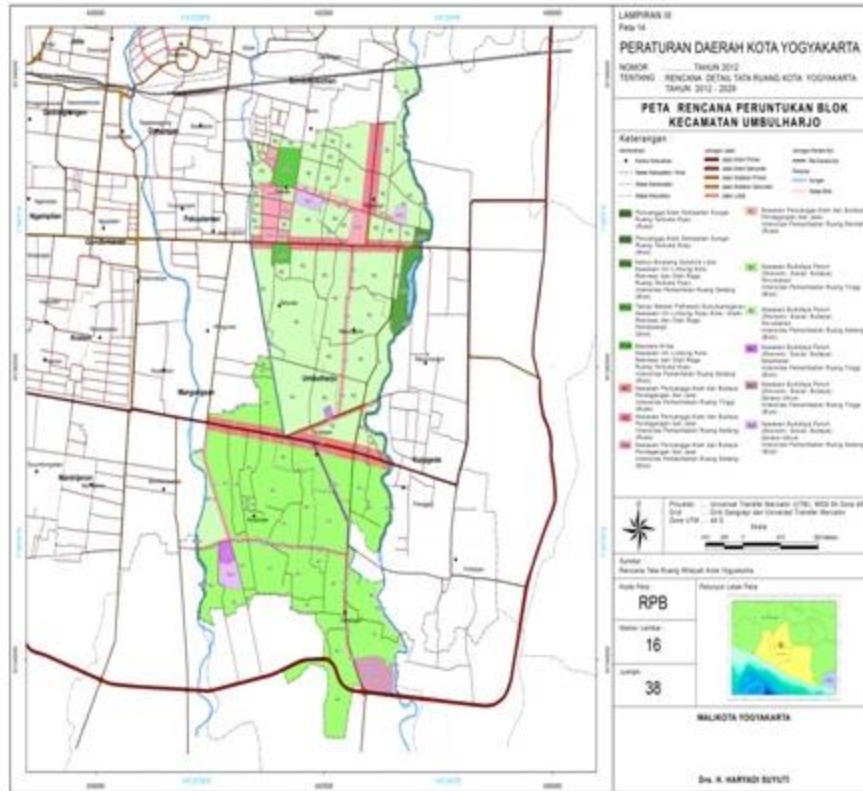
²¹ CNN Indonesia (2019). "Kecamatan di Yogyakarta Diubah Jadi Kapanewon dan Kemantren". Nasional: politik.

No	Kemantren	Luas Area (Km2)	Jumlah
3	Gondokusuman	3,986	43214
4	Danurejan	1,109	21093
5	Gedongtengen	0,985	19141
6	Ngampilan	0,841	17925
7	Wirobrajan	1,771	28271
8	Mantrijeron	2,672	35398
9	Kraton	1,375	21325
10	Gondomanan	1,142	14590
11	Pakualaman	0,647	10592
12	Mergangsan	2,297	31697
13	Umbulharjo	8,326	72203
14	Kotagede	2,988	35654

Sumber: Hasil olah Bagian Tata Pemerintahan Luas wilayah , 2024 dan DISDUKCAPIL Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data Tabel 1.1 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemantren Umbulharjo memiliki luas wilayah terbesar yaitu 8,326 km persegi dan juga populasi tertinggi di antara 14 Kemantren di Kota Yogyakarta yaitu sejumlah 72.203 penduduk.

Gambar 1.3
Peta Kemantren Umbulharjo



Sumber: Kantor Kemantren Umbulharjo, 2025

Berdasarkan Gambar 1.3 Kemantren Umbulharjo terletak di sisi bagian selatan dan menjadi salah satu dari 14 kemantren yang ada di Kota Yogyakarta. Kemantren ini berbatasan langsung dengan Kemantren Gondokusuman di sebelah utara, Kemantren Banguntapan dan Kabupaten Bantul di sebelah timur, Kemantren Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan Kemantren Kotagede di sebelah selatan, serta Kemantren Mergangsan di sebelah barat. Kemantren Umbulharjo merupakan wilayah dataran rendah yang dilintasi oleh tiga sungai utama, yaitu Sungai Gajah Wong di timur, Sungai Belik di tengah, dan Sungai Code di barat, dengan ketinggian 114 meter di atas permukaan laut. Wilayah

ini mencakup tujuh kelurahan, yaitu Giwangan, Sorosutan, Pandeyan, Warungboto, Tahunan, Muja-Muju, dan Semaki.²²

Bersumber dari data Badan Pusat Statistika, kewilayahan Kemantren Umbulharjo memiliki persebaran infrastruktur pendidikan, akomodasi, dan perdagangan yang membentuk karakteristik tersendiri di setiap kelurahannya. Di sektor pendidikan tinggi, Kelurahan Sorosutan dan Warungboto menjadi pusat konsentrasi aktivitas akademik dengan keberadaan 13 perguruan tinggi swasta. Di wilayah Sorosutan, terdapat aktivitas perkuliahan di kampus-kampus seperti Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Kampus 4 dan Kampus 5, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, serta Akademi Kebidanan Ummi Khasanah. Sementara itu, Kelurahan Warungboto melingkupi aktivitas akademik dari kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Kampus 2 dan Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI/STMIK Akakom). Konsentrasi lembaga pendidikan ini diperkuat oleh keberadaan sekolah formal di tingkat dasar dan menengah yang tersebar di seluruh Umbulharjo, meliputi 40 Taman Kanak-Kanak, 25 Sekolah Dasar, 9 SMP, dan 18 SMA/SMK.²³ Keberadaan sejumlah kampus dan puluhan sekolah tersebut secara menstimulasi pertumbuhan fasilitas akomodasi di sekitarnya. Ribuan mahasiswa dan pelajar dari luar daerah memicu tingginya densitas rumah kos serta pemukiman sewa di sekitar Sorosutan dan Warungboto, yang berfungsi memenuhi kebutuhan hunian kos dan rumah kontrakan jangka panjang.

Di sisi lain, sektor perdagangan dan perputaran logistik wilayah berpusat pada beberapa pasar tradisional dengan skala luas area yang bervariasi. Kelurahan Giwangan menjadi titik paling signifikan di sisi selatan

²² BPS. (2024) *Kemantren Umbulharjo Dalam Angka 2024*.

²³ Ibid.

dengan adanya Pasar Induk Giwangan, yang menempati lahan seluas 24.594 m² dengan 678 pedagang teridentifikasi, menjadikannya sebagai pusat grosir sayur dan buah utama. Kelurahan Sorosutan juga memiliki fasilitas perdagangan Pasar Sepeda Tunjungsari dengan luas wilayah 1.147 m². Sementara itu, di Kelurahan Semaki, juga terdapat Pasar Pace dengan luas 90 m² yang menjual sayuran dan sembako.²⁴

Faktor luas wilayah, tingginya jumlah penduduk, dan adanya fasilitas publik di Kemantren Umbulharjo berpengaruh terhadap jumlah timbulan sampah di wilayah. Hal tersebut didukung dengan adanya aktivitas manusia yang dilakukan, seperti di pasar, fasilitas pendidikan, dan ruang publik lainnya yang berkontribusi pada timbulnya sampah rumah tangga maupun sejenisnya. Volume sampah yang dihasilkan setiap hari di suatu wilayah berkaitan dengan jumlah penduduk serta dinamika yang berlangsung di area tersebut.²⁵ Jumlah konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa memiliki hubungan yang selaras dengan banyaknya produksi sampah serta limbah yang ditimbulkan.

²⁴ Ibid.

²⁵ Damanhuri, E., & Padmi, T. (2019). *Pengelolaan sampah terpadu*. Itb Press.

Gambar 1.4
Timbulan Sampah Kemantren di Kota Yogyakarta 2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022.

Berdasarkan Gambar 1.4 data jumlah timbulan sampah tiap kemantren, data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kemantren Umbulharjo memiliki jumlah produksi harian sampah tertinggi yaitu 212,81 m³ perhari. Hal ini tentunya berbanding lurus dengan tingginya jumlah penduduk yaitu 70,9 ribu jiwa yang menghasilkan sampah di Kemantren Umbulharjo. Lonjakan volume sampah di Umbulharjo secara langsung mencerminkan tingginya densitas dan aktivitas populasi di kemantren tersebut, menjadikannya fokus utama dalam strategi pengelolaan dan pengurangan sampah di Kota Yogyakarta.

Produksi timbulan sampah di Kota Yogyakarta, terutama di Kemantren Umbulharjo harus disertai dengan sistem pengelolaan sampah yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks di masa mendatang. Saat ini volume sampah harian Kota Yogyakarta yang berkisar 190 - 200 ton dikelola melalui lima Unit Pengolah Sampah (UPS) atau TPS3R yang telah beroperasi. Total kapasitas kelima UPS tersebut mencapai puluhan ton per hari, UPS Nitikan (sekitar 60 ton), UPS Kranon (25 - 30 ton), UPS Giwangan (25-

30 ton), dan UPS Miri (12,5-15 ton).²⁶ Upaya penanganan ini diperkuat dengan rencana penerimaan hingga 50 ton sampah harian dari Yogyakarta oleh TPS Bawuran pada perencanaan pembangunan oleh Pemkot Yogyakarta. Di Kemantren Umbulharjo sendiri terdapat 3 UPS diantaranya yang beroperasi untuk mengolah sampah dari berbagai depo-depo di Kota Yogyakarta, yaitu UPS Kranon, UPS Giwangan, dan UPS Nitikan. Adanya infrastruktur pengelolaan sampah regional Kota Yogyakarta yang terkonsentrasi di Umbulharjo juga menjadi pertimbangan dalam dinamika pemanfaatan sampah di masyarakat.

Kebijakan Pemkot Yogyakarta dalam mengelola sampah melalui Gerakan Zero Sampah Anorganik yang efektif sejak awal 2023, secara garis besar bertujuan untuk melarang pembuangan sampah di depo-depo sekaligus bentuk optimalisasi bank sampah di wilayah. Lalu program Organikkan Jogja sebagai bentuk intruksi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah organik dari hulunya yaitu rumah tangga. Namun, Pemkot Yogyakarta menyadari bahwa volume sampah harian yang didominasi oleh sampah organik (sisa makanan dan dedaunan) masih menjadi masalah besar yang harus diselesaikan langsung di sumbernya.²⁷ Oleh karena itu, Mas JOS terbitkan untuk memperluas fokus pengelolaan dari hanya anorganik menjadi seluruh jenis sampah. Program Mas JOS dilaksanakan dalam 5 langkah yang berfungsi sebagai panduan yang mudah diingat, sehingga mendorong perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sampahnya. Mas JOS memastikan bahwa setiap rumah tangga tidak hanya memilah anorganik ke bank sampah (sesuai gerakan awal), tetapi juga wajib mengolah sampah organik di rumah (melalui biopori atau komposter) dan mengadopsi gaya hidup

²⁶ BPK RI. (2025). Timbunan Sampah Mulai Tertangani Lewat UPS.

<https://yogyakarta.bpk.go.id/timbunan-sampah-mulai-tertangani-lewat-ups/>

²⁷ Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. (2025). Mas Jos Ajak Warga Terbiasa Pilah Sampah Dari Rumah.

peduli sampah, menjadikan program ini sebagai bentuk optimisme dalam menginternalisasi budaya kolektif yang berkelanjutan di masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini pelaksanaan Program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo menjadi objek penelitian yang baru dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah di tingkat kemantren/kecamatan.

Studi yang dilakukan oleh Diah Ayu Kuswardani pada tahun 2024 dalam “Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.”, mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta masih belum optimal. Implementasi dari sisi internal dinas dinilai sudah berjalan baik, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas dan tenaga kerja, serta anggaran dan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terbatas.²⁸ Hasil penelitian bersifat general dan memiliki lokus yang luas dengan lingkup Kota Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki lokus yang spesifik di tingkat kemantren atau kecamatan yaitu di Kemantren Umbulharjo.

Hasil yang serupa ditemukan oleh Nova Cantya dan Agustina Rahmawati pada tahun 2024 dalam studi “Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah Melalui Metode Biopori di Kota Yogyakarta.”. Mereka mengidentifikasi hambatan utama seperti kurangnya partisipasi masyarakat, pemahaman, dan edukasi, serta keterbatasan alat dan dukungan teknis. Penelitian yang didasarkan pada teori Grindle ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen.²⁹ Penelitian Nova Cantya dan Agustina Rahmawati

²⁸ Kuswardani, D Ayu. (2024). Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Asdaf Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

²⁹ Nova Cantya dan Agustina Rahmawati. (2024). Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah Melalui Metode Biopori di Kota Yogyakarta. PAMARENDA : Public Administration and Government Journal.

memiliki lingkup yang luas yaitu Kota Yogyakarta dengan orientasi pada implementasi pengelolaan sampah khusus organik melalui metode biopori.

Sementara itu, Eyda Firdausi pada tahun 2024 meneliti implementasi program bank sampah di Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta dalam “Implementasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Bank Sampah di Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta.”. Meskipun program ini sudah berjalan baik, efektivitasnya perlu ditingkatkan. Hambatan yang diidentifikasi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya pengelola, dan buruknya sistem administrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta didasarkan pada teori pengelolaan sampah berkelanjutan.³⁰ Dalam penelitiannya Eyda menggunakan pendekatan analisis pembangunan berkelanjutan *SDGs* 11, “Kota dan Permukiman Berkelanjutan” dan *SDGs* 12, “Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan”. Dengan kasus spesifik yaitu bank sampah di Kelurahan Kota Baru, Kota Yogyakarta.

Di sisi lain, penelitian yang lebih luas oleh Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, dan Noeng Muhadjir pada tahun 2014, dalam “Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik. “ yang mengkaji kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik di lima kabupaten/kota di DIY, menunjukkan dampak positif. Kebijakan ini menghasilkan lingkungan yang lebih bersih, asri, dan nyaman. Program pengelolaan sampah didukung oleh berbagai regulasi, insentif, dan partisipasi masyarakat. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa pemantauan kebijakan belum memiliki prosedur baku. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini didasarkan pada konsep kebijakan publik dan pengelolaan

³⁰ Firdausi, Eyda. (2024). Implementasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan : Studi Kasus Bank Sampah di Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta. Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains: Ecotas.

sampah terpadu.³¹ Model kebijakan pada penelitian ini memiliki hasil kajian yang komprehensif kaitannya dengan kebijakan Pemda DIY dalam pengelolaan permasalahan sampah. Namun dengan lokus yang luas diperlukan penelitian dari sisi yang lebih kecil untuk menganalisis implementasi pengelolaan sampah secara lebih konkrit.

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Loura Prasastiningtyas pada 2024, dalam penelitian “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga Oleh Bank Sampah Di Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta” dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Metter dan Van Horn, ditemukan bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah rumah tangga oleh bank sampah di Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, belum efektif. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik *snowball sampling* dan triangulasi data, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tujuan kebijakan sudah jelas, efektivitasnya terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat, pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta fasilitas yang terbatas. Selain itu, kebiasaan sosial masyarakat juga menjadi kendala, meskipun koordinasi antarpihak terkait sudah berjalan dengan baik.³² Penelitian Loura dapat menggambarkan dinamika dan permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi. Sehingga dapat memberikan gambaran umum dalam konstelasi kebijakan pengelolaan sampah di masyarakat.

Pendekatan penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan dengan lokus penelitian di Kemantren Umbulharjo. Ditambah dengan adanya berbagai dinamika permasalahan yang dijelaskan pada latar

³¹ Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, dan Noeng Muhadjir. (2014). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik. Artikel penelitian.

³² Loura Prasastiningtyas dan Tri Yuniningsih (2024), Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga Oleh Bank Sampah Di Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

belakang meliputi isu timbulan sampah rumah tangga, penerbitan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah, penutupan TPA Piyungan; luas wilayah, kepadatan penduduk, dan tingginya jumlah timbulan sampah di Kemantren Umbulharjo muncul sebagai faktor kebaruan dari penelitian ini. Ditambah adanya pelaksanaan program Mas JOS, memunculkan diskursus terhadap kompleksitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kemantren Umbulharjo. Meski dengan keberjalanan implementasi program Mas JOS yang dilaksanakan sejak awal bulan Agustus 2025, diperlukan kajian mendalam pada proses implementasi program ini yang kemudian dapat digunakan sebagai data pada penelitian yang akan datang. Oleh karena itu, dengan ini penulis melakukan penelitian terhadap implementasi Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta).

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian yang akan dilakukan, Implementasi Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta secara umum memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan dalam Implementasi Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Implementasi Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta bertujuan untuk:

1. Menganalisis Implementasi Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta
3. Menyusun evaluasi dan rekomendasi kebijakan Implementasi Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menyumbangkan pengetahuan mengenai implementasi program pengelolaan sampah dan gambaran pelaksanaannya di tingkat kecamatan dengan kompleksitas yang ada.
2. Menggagas aspek politis dengan memberikan analisis patologi kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan program pengelolaan sampah dari prespektif tingkat kecamatan sebagai pengayaan bidang keilmuan kebijakan publik.
3. Menyediakan data dan informasi yang berguna bagi penelitian lebih lanjut mengenai isu-isu terkait proses pelaksanaan program di bidang pengelolaan sampah di tingkat kecamatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan serta pelaksanaan program pengelolaan sampah yang efektif, substansial dan berkelanjutan di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.
2. Menjadi referensi dengan memberikan prespektif dari sisi akademis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pengelolaan sampah yang berorientasi pada teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen dasar dalam memahami bagaimana pemerintah merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan umum. Dalam suatu permasalahan, kebijakan publik menjadi bentuk sikap kehadiran maupun ketidakhadiran pemerintah ataupun lembaga legislatif dalam penyelesaian masalah tersebut.³³ Dalam menyelesaikan permasalahan publik, kebijakan menjadi alat pemerintah dalam merumuskan solusi yang efektif.

Kebijakan publik pertama kali diperkenalkan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang memandang kebijakan sebagai suatu rancangan program yang berisi tujuan, nilai, serta praktik tertentu yang hendak diwujudkan oleh pemerintah.³⁴ Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan

³³ Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public policy: A new introduction*. Bloomsbury Publishing.

³⁴ Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

publik tidak hanya sekadar keputusan administratif, tetapi juga mencerminkan arah dan nilai-nilai yang ingin dikembangkan oleh suatu pemerintahan.

Carl I. Fredrick menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang penuh dengan peluang dan tantangan, dengan maksud untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sekaligus mengatasi hambatan yang dihadapi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁵

Sementara itu, Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala bentuk pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang menegaskan bahwa baik tindakan maupun ketidakaktifan pemerintah tetap termasuk dalam ranah kebijakan publik.³⁶

Sejalan dengan hal tersebut, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup segala hal yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah, bahkan termasuk yang tidak dilakukan, karena keseluruhannya merepresentasikan tujuan, sasaran, dan strategi pemerintah dalam penyelenggaraan program publik.³⁷

James Anderson dalam Nugroho mendefinisikan kebijakan publik sebagai pelaksanaan tindakan yang relatif stabil dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, yang diikuti oleh satu aktor atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu permasalahan.³⁸ Pandangan ini menyoroti aspek

³⁵ Ibid.

³⁶ Subiyanto, B. (2020). *Kebijakan Publik dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

³⁷ Kadji, Y. (2015). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Gorontalo: Ideas Publishing.

³⁸ James E. Anderson. (2000). Dalam Nugroho, R. (2015). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

implementatif dan keberlanjutan dari kebijakan publik, di mana kebijakan tidak berhenti pada tahap formulasi, tetapi juga harus dijalankan secara konsisten oleh pelaksana di lapangan.

Lebih lanjut, James Lester dan Robert Stewart mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses atau rangkaian aktivitas serta keputusan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi permasalahan publik, baik yang bersifat nyata maupun imajiner.³⁹ Definisi ini menekankan kebijakan sebagai sebuah *process-oriented activity*, yaitu kegiatan yang dinamis dan melibatkan pengambilan keputusan yang berkelanjutan sesuai perubahan kondisi sosial dan politik.

Sementara David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai proses pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif kepada seluruh anggota masyarakat.⁴⁰ Pandangan ini menggarisbawahi bahwa kebijakan publik adalah wujud dari penggunaan kekuasaan oleh otoritas politik untuk mendistribusikan sumber daya, hak, dan kewajiban dalam suatu sistem sosial.

1.5.2 Siklus Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen dari tindakan negara yang memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaan maupun penyusunannya. Menurut Charles Lindblom, proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai variabel dan tahapan yang saling berhubungan. Kompleksitas ini muncul akibat banyaknya aktor yang terlibat baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun kelompok kepentingan yang masing-masing memiliki nilai, tujuan, serta kepentingan

³⁹ James Lester & Robert Stewart. (2000). Dalam Nugroho, R. (2015). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo

⁴⁰ David Easton. (1969). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.

yang berbeda.⁴¹ Oleh sebab itu, untuk memahami dinamika tersebut secara lebih sistematis, para ahli kebijakan publik kemudian membagi proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap yang terstruktur.

Siklus dalam kebijakan publik merupakan serangkaian tahapan yang kompleks dan dinamis yang berlangsung dalam konteks sosial, politik, dan kelembagaan. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek teknokratis, tetapi juga mencerminkan dinamika sosiopolitik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan latar belakang yang beragam. Menurut Mustopadidjaja, pembuatan kebijakan publik bukan sekadar kegiatan administratif atau teknis, melainkan proses sosial yang sarat dengan interaksi antar kepentingan dalam sistem kelembagaan yang kompleks.⁴²

Pembagian tahapan ini bertujuan agar proses analisis terhadap kebijakan publik dapat dilakukan dengan lebih terarah dan komprehensif. Melalui pembagian tahap, peneliti dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi secara jelas bagaimana suatu masalah publik dirumuskan, bagaimana alternatif solusi dipilih, serta bagaimana keputusan diimplementasikan dan dievaluasi. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya pengawasan terhadap efektivitas setiap tahap kebijakan, sehingga proses kebijakan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga reflektif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan politik.

Kebijakan publik melalui serangkaian tahapan yang saling berhubungan dan membentuk suatu siklus yang disebut dengan *policy cycle*. Menurut Howlett dan Ramesh, terdapat lima tahapan utama dalam tahapan

⁴¹ Charles Lindblom (1986). dalam Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

⁴² Mustopadidjaja, A. R. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN Press.

kebijakan publik, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.⁴³

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Yaitu proses awal untuk menentukan isu atau masalah publik yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tidak semua masalah sosial dapat langsung masuk ke agenda kebijakan, karena hanya isu-isu tertentu yang dianggap penting, mendesak, dan memiliki dukungan politik yang memadai. Pada tahap ini, aktor kebijakan seperti pemerintah, kelompok kepentingan, media massa, serta masyarakat berperan penting dalam membingkai isu agar memperoleh legitimasi politik dan prioritas kebijakan.

2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)

Di mana pemerintah bersama para ahli dan pemangku kepentingan merumuskan berbagai alternatif solusi atas masalah publik yang telah diidentifikasi. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap setiap alternatif kebijakan, mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kelayakan politik, serta dampak sosial yang mungkin ditimbulkan. Hasil dari tahap ini biasanya berupa rancangan kebijakan yang siap untuk dipertimbangkan pada tahap pengambilan keputusan.

3. Pembuatan kebijakan (*decision making*)

⁴³ Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.

Yakni saat pihak berwenang seperti lembaga legislatif atau eksekutif menentukan pilihan terhadap alternatif kebijakan yang dianggap paling layak untuk dilaksanakan. Proses ini sering kali diwarnai dengan perdebatan politik, negosiasi, dan kompromi antara berbagai kepentingan. Keputusan yang diambil dapat berupa tindakan nyata (*action*) atau keputusan untuk tidak bertindak (*non-action*), tergantung pada konteks dan perhitungan politik yang berlaku.

4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Yang merupakan proses pelaksanaan kebijakan ke dalam bentuk program, kegiatan, atau tindakan nyata di lapangan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta dukungan teknis dan politik. Sering kali, masalah muncul pada tahap ini akibat birokrasi yang tidak efisien, perbedaan interpretasi terhadap kebijakan, atau ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kondisi di lapangan.

5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting untuk memberikan umpan balik (*feedback*) dalam memperbaiki kebijakan yang sedang berjalan atau sebagai bahan

pertimbangan untuk merumuskan kebijakan baru di masa mendatang.

Siklus kebijakan publik menunjukkan bahwa proses perumusan hingga evaluasi kebijakan merupakan rangkaian yang berkesinambungan. Setiap tahap memiliki fungsi strategis dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada keputusan akhir, tetapi juga pada proses yang menjadi landasan kebijakan.

1.5.3 Implementasi Kebijakan

Sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah digunakan sebagai acuan oleh pejabat ataupun lembaga di bawahnya untuk melaksanakan urusan publik. Van Meter dan Van Horn mendeskripsikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang telah dibuat sebelumnya.⁴⁴ Tindakan tersebut mencakup upaya untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi langkah-langkah operasional dalam periode waktu tertentu, serta untuk melanjutkan usaha-usaha yang bertujuan mencapai perubahan besar dan kecil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang dijalankan oleh organisasi publik.

Menurut Paul Sabatier dan Daniel A. Mazmanian yang dikutip oleh Solihin Abdul Wahab, implementasi kebijakan adalah pemahaman mengenai apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku. Fokusnya terletak pada implementasi kebijakan dalam kegiatan yang muncul setelah pedoman-pedoman kebijakan negara disahkan. Hal ini mencakup usaha

⁴⁴ Budi, W. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita. Halaman 146-147.

negara dalam mengelola kebijakan tersebut serta dampak dan akibat yang ditimbulkan, yang memiliki pengaruh nyata terhadap masyarakat.⁴⁵ Horn dan Meter mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai "*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*".⁴⁶ Yaitu sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dirumuskan oleh pemerintah.

Istilah kebijakan memiliki banyak arti. Menurut Hogwood dan Gunn, ada sepuluh penggunaan istilah kebijakan, di antaranya sebagai label untuk bidang aktivitas, ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara, proposal spesifik, keputusan pemerintah, program, otorisasi formal, hasil (*outcome*), teori atau model, dan sebagai proses. Makna modern dari kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik.⁴⁷ Kebijakan publik menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan oleh negara karena merupakan bagian integral dari pemerintahan. Negara tanpa kebijakan publik dianggap gagal karena kehidupan hanya akan diatur oleh sekelompok orang saja.

Menurut George C. Edward III, pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.⁴⁸ Yang diuraikan sebagai berikut:

⁴⁵ Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁴⁶ Mulyadi. 2015. *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

⁴⁷ Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

⁴⁸ George C. Edward III dalam Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III, faktor komunikasi memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi dapat berjalan efektif apabila para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan memahami secara jelas tugas serta tanggung jawab yang harus mereka jalankan. Pemahaman tersebut hanya dapat tercapai apabila proses komunikasi berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan aturan pelaksanaannya perlu disampaikan kepada pihak yang berwenang secara tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi yang efektif memungkinkan adanya keseragaman persepsi dan tindakan antara pembuat keputusan dan pelaksana kebijakan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat tiga indikator utama yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana komunikasi berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

a. Transmisi

Transmisi mengacu pada proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat keputusan kepada pelaksana di lapangan. Penyaluran komunikasi yang efektif akan menghasilkan implementasi yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi miskomunikasi akibat pesan kebijakan melewati banyak tingkatan birokrasi, sehingga makna dan tujuan awalnya dapat terdistorsi di tengah proses penyampaian.

b. Kejelasan

Hal ini menekankan pentingnya pesan kebijakan yang disampaikan secara jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh pelaksana di tingkat bawah (*street-level bureaucrats*). Pesan yang tidak jelas memang dapat memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan, tetapi ketidakpastian yang berlebihan justru dapat menggeser atau menyelewengkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi

Konsistensi berkaitan dengan stabilitas perintah dan arahan dalam pelaksanaan kebijakan. Instruksi yang sering berubah-ubah akan menyebabkan kebingungan di kalangan pelaksana dan menurunkan efektivitas implementasi. Oleh karena itu, kejelasan serta konsistensi pesan kebijakan menjadi faktor penting agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.¹

2. Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia, baik itu manusia, dana, waktu, maupun peralatan, sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Jika kebijakan mengharuskan adanya sumber daya yang cukup, namun sumber daya tersebut tidak tersedia atau terbatas, maka kebijakan akan sulit untuk dijalankan. Menurut George C. Edward III sumber daya mencakup beberapa aspek utama, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

a. Staf

Staf merupakan sumber daya utama dalam proses implementasi kebijakan. Banyak kegagalan implementasi terjadi karena jumlah staf yang tidak mencukupi atau kurang memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada jumlah staf, tetapi juga pada kemampuan, keahlian, dan kapabilitas mereka dalam melaksanakan kebijakan secara profesional.

b. Informasi

Informasi memiliki dua bentuk penting dalam mendukung implementasi. Pertama, informasi yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan kebijakan, agar para pelaksana memahami apa yang harus dilakukan saat menerima instruksi. Kedua, informasi mengenai tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap regulasi yang berlaku. Pengetahuan tentang kepatuhan ini penting agar kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan yang diinginkan.

c. Wewenang

Wewenang atau otoritas formal menjadi dasar legitimasi bagi para pelaksana kebijakan. Kewenangan yang sah memungkinkan pelaksana menjalankan kebijakan secara efektif dan mendapatkan pengakuan publik. Sebaliknya, jika wewenang tidak jelas atau tidak diakui, maka proses implementasi dapat terganggu karena kurangnya legitimasi dalam tindakan pelaksana.

d. Fasilitas fisik

Fasilitas fisik seperti sarana dan prasarana juga memegang peran penting. Meskipun staf sudah memadai dan memiliki keahlian serta wewenang yang cukup, tanpa dukungan fasilitas pendukung, kebijakan tidak akan berjalan optimal. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang lengkap dan saling mendukung.

3. Disposisi

Menurut George C. Edward III, faktor ketiga yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan. Disposisi mencerminkan komitmen, kemauan, dan orientasi nilai yang dimiliki oleh para implementor dalam menjalankan kebijakan. Sikap ini menjadi aspek penting karena menentukan sejauh mana pelaksana bersedia dan berupaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan sebagaimana yang telah dirumuskan. Dengan demikian, efektivitas implementasi tidak hanya bergantung pada pemahaman pelaksana terhadap tugas yang harus dilakukan, tetapi juga pada kesediaan dan kemampuan mereka untuk melaksanakannya secara konsisten agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik di lapangan. Terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam variabel disposisi, diantaranya:

- a. Pengangkatan birokrat, harus dilakukan dengan selektif, memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki dedikasi tinggi terhadap tujuan kebijakan dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Sikap birokrat yang tidak sejalan

dengan arah kebijakan dapat menjadi penghambat nyata dalam proses implementasi.

- b. Insentif dapat digunakan sebagai instrumen strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan perilaku pelaksana kebijakan. Edward III menegaskan bahwa kecenderungan manusia untuk bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau organisasional dapat dikelola melalui manipulasi insentif. Dengan memberikan keuntungan tertentu atau mengurangi beban pelaksana, pembuat kebijakan dapat memotivasi mereka agar bekerja secara optimal dan selaras dengan tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Meskipun berbagai sumber daya telah tersedia dan para pelaksana memahami serta memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan, keberhasilan pelaksanaannya tetap dapat terhambat apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang tidak efisien dapat menimbulkan hambatan koordinasi dan memperlambat proses pelaksanaan kebijakan, terutama pada kebijakan yang bersifat kompleks dan memerlukan kerja sama dari banyak pihak.

Birokrasi berperan sebagai pelaksana utama yang harus mampu menciptakan sistem kerja yang terkoordinasi dan responsif terhadap kebutuhan pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang kondusif akan membantu memastikan setiap sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung kelancaran implementasi kebijakan

publik yang telah ditetapkan. Terdapat dua karakteristik utama yang dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja struktur birokrasi atau organisasi menuju arah yang lebih optimal, yaitu:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu seperangkat pedoman kerja yang berfungsi sebagai acuan bagi para pegawai atau pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas sehari-hari. SOP membantu memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan, sehingga efisiensi dan akuntabilitas organisasi dapat terjaga.
- b. Fragmentasi, yakni upaya untuk membagi dan mendistribusikan tanggung jawab serta kegiatan antarunit kerja dalam organisasi. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan beban kerja pada satu pihak tertentu, sekaligus meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di berbagai level birokrasi.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dapat ditegaskan bahwasannya sebuah program dalam kebijakan sangat bergantung pada keterpaduan empat variabel utama sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam penelitian implementasi kebijakan program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo, keempat variabel tersebut menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan program dalam mengatasi permasalahan sampah di tingkat lokal. Komunikasi yang jelas antara pemerintah, pelaksana lapangan, dan masyarakat akan memastikan kesamaan

persepsi terhadap tujuan program. Keberhasilan program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan yang baik, tetapi juga oleh sejauh mana keempat variabel tersebut dapat diintegrasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lingkungan menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah maupun masyarakat guna menciptakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan yang efektif di Kota Yogyakarta.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Penelitian ini berfokus pada implementasi Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) oleh pelaksana di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Dalam memahami pelaksanaan program tersebut secara komprehensif, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang mengacu pada tiga teori utama yang saling berkaitan, yaitu teori kebijakan publik, siklus kebijakan publik, dan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

Konsep pertama dalam penelitian ini adalah kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan instrumen dasar dalam memahami bagaimana pemerintah merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan umum. Kebijakan publik pada dasarnya adalah wujud nyata dari penggunaan kekuasaan oleh otoritas politik untuk mendistribusikan sumber daya, hak, dan kewajiban dalam suatu sistem sosial. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, Program Mas JOS dalam penelitian ini dipahami sebagai sebuah kebijakan publik yang hadir sebagai respons Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap permasalahan pengelolaan sampah yang bersifat mendesak dan memerlukan keterlibatan aktif berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat.

Konsep kedua yang menjadi kerangka pemahaman dalam penelitian ini adalah siklus kebijakan publik. Berdasarkan gagasan Howlett dan Ramesh, proses kebijakan publik dibagi dalam lima tahapan yang membentuk suatu *policy cycle*, yaitu penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), pembuatan kebijakan (*decision making*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Siklus kebijakan publik berjalan melalui lima tahapan yang saling berkesinambungan, dimulai dari penyusunan agenda untuk menyaring isu publik yang mendesak dan memiliki dukungan politik agar ditangani pemerintah. Selanjutnya, pada tahap formulasi, pemerintah bersama para ahli merumuskan berbagai alternatif solusi berdasarkan analisis efektivitas, efisiensi, dan dampak sosialnya. Alternatif terbaik kemudian ditetapkan dalam tahap pembuatan kebijakan yang sering kali melibatkan negosiasi dan kompromi antaraktor. Setelah disahkan, kebijakan tersebut masuk ke tahap implementasi untuk dieksekusi menjadi tindakan nyata di lapangan dengan mengandalkan koordinasi instansi dan kecukupan sumber daya. Siklus ini diakhiri oleh tahap evaluasi yang mengukur sejauh mana keberhasilan kebijakan tersebut, di mana hasilnya akan menjadi umpan balik berharga untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Dalam konteks penelitian ini, Program Mas JOS dipahami sebagai produk dari keseluruhan siklus kebijakan, yang lahir dari proses penyusunan agenda pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, dirumuskan melalui tahap formulasi dan pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, dan kini berada pada tahap implementasi yang menjadi fokus utama kajian ini. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi tahap evaluasi Program Mas JOS, khususnya dalam pelaksanaannya di wilayah Kemantren Umbulharjo.

Konsep ketiga yang menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III.

Implementasi kebijakan secara konseptual dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor kebijakan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan sesuai sasaran yang telah dirumuskan. Edward III sendiri menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling berkaitan dan bekerja secara sinergis.

Variabel pertama adalah komunikasi, yang secara konseptual dipahami sebagai proses penyampaian informasi dan instruksi kebijakan dari pembuat keputusan kepada para pelaksana secara tepat, jelas, dan konsisten.

Variabel kedua adalah sumber daya, yang secara konseptual merujuk pada keseluruhan kapasitas yang diperlukan agar suatu kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Edward III menekankan bahwa sumber daya mencakup empat aspek yang saling melengkapi, yaitu staf yang kompeten dan mencukupi, informasi mengenai tata cara pelaksanaan maupun tingkat kepatuhan pelaksana, wewenang yang memberikan legitimasi bagi pelaksana dalam menjalankan tugasnya, serta fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana pendukung.

Variabel ketiga adalah disposisi, yang secara konseptual dipahami sebagai sikap, komitmen, dan orientasi nilai yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Disposisi mencerminkan sejauh mana pelaksana memiliki kemauan dan dedikasi untuk mewujudkan tujuan kebijakan secara konsisten tanpa terjadi penyimpangan antara apa yang diamanatkan kebijakan dengan apa yang dipraktikkan di lapangan.

Variabel keempat adalah struktur birokrasi, yang secara konseptual merujuk pada tatanan kelembagaan yang mengatur pembagian tugas, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta prosedur operasional standar yang menjadi acuan bagi para pelaksana. Edward III mengidentifikasi dua karakteristik utama dalam struktur

birokrasi yang mendukung efektivitas implementasi, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai seperangkat pedoman kerja yang memastikan setiap kegiatan dilakukan secara konsisten sesuai standar yang telah ditetapkan, serta fragmentasi sebagai upaya membagi dan mendistribusikan tanggung jawab antarunit kerja guna mencegah penumpukan beban pada satu pihak tertentu dan meningkatkan efektivitas koordinasi secara keseluruhan.

Dengan menggunakan keempat variabel dalam teori Impelentasi Kebijakan Edward III sebagai kerangka analisis, penelitian ini berupaya mengkaji secara menyeluruh sejauh mana pelaksanaan Program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo telah berjalan secara efektif, dengan memperhatikan dinamika komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang diterapkan.

1.6.2 Definisi Operasional

Tabel 1.2
Operasionalisasi Konsep

Variabel	Konsep	Aspek	Operasionalisasi
Kebijakan Publik oleh Pemkot Kota Yogyakarta dalam merespon isu pengelolaan sampah	Respons pemerintah berbasis kebijakan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah.	Instrumen Intervensi Pemerintah	Mengidentifikasi karakter wilayah (<i>input</i>) yang sudah ada dan memahami kedudukan Program Mas JOS sebagai kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi krisis pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo. Dilakukan melalui kajian data, berita, SE walikota, dan keterangan DLH Kota Yogyakarta. Dilakukan dengan mengidentifikasi orientasi pelaksana terhadap program Mas JOS pada proses wawancara.
Siklus Kebijakan pengelolaan	<i>Policy Cycle</i> menurut	Tahapan Implementai Kebijakan	Penempatan Program Mas JOS yang saat ini berada pada tahap Implementasi pasca penyusunan agenda dan formulasi. Berfokus pada aspek tahap pelaksanaan program Mas JOS, mengidentifikasi

Variabel	Konsep	Aspek	Operasionalisasi
sampah di Kota Yogyakarta melalui program Mas JOS	Howlett & Ramesh.	dan Evaluasi.	intruksi dan pelaksana yang memiliki kewenangan pada implementasi program Mas JOS sesuai Se Walikota Yogyakarta tahun 2025 tentang Mas JOS. Mengidentifikasi aspirasi pelaksana terhadap Mas JOS sebagai tahap evaluasi yang digali menggunakan instrumen dalam wawancara.
Implementasi Program Mas JOS oleh pelaksana di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta	Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III	Komunikasi	Adanya proses komunikasi yang meliputi aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam pelaksanaan program Mas JOS oleh pelaksana program yaitu Kepala Dinas DLH Kota Yogyakarta, Mantri Pamong Praja (MPP) dari Pemerintah Kemantren Umbulharjo, Pelaksana di wilayah (lurah, FBS, dan Kader Mas JOS). Dilakukan dengan metode wawancara kepada informan pelaksana.
			Kuantitas frekuensi komunikasi antara pihak DLH Kota Yogyakarta, MPP, dan pelaksana wilayah dalam implementasi program Mas JOS melalui media penyuratan, pertemuan, dan informasi digital pada sosialisasi dalam pelaksanaan program. Dilakukan dengan metode wawancara kepada informan pelaksana.
			Keterlibatan Pemkot Yogyakarta, DLH Kota Yogyakarta, Mantri Pamong Praja, dan pelaksana wilayah dalam diskusi program Mas JOS pada pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo. Dilakukan dengan metode wawancara kepada informan pelaksana.
		Sumber Daya	Ketersediaan anggaran yang cukup dalam pelaksanaan Program Mas JOS oleh Pemkot

Variabel	Konsep	Aspek	Operasionalisasi
			Yogyakarta melalui insentif pelaksana wilayah dan juga <i>reward</i> kepada pelaksana wilayah. Dilakukan dengan metode wawancara kepada informan pelaksana dan observasi lapangan.
			Ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah dalam program Mas JOS oleh DLH Kota Yogyakarta maupun CSR di Kemantren Umbulharjo dalam bentuk sumur biopori, fasilitasi bank sampah unit, ember dan galon, serta unit maggot. Dilakukan dengan wawancara kepada informan pelaksana dan observasi.
			Kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan kuantitas tenaga kerja yang mencukupi di Kemantren Umbulharjo dalam pelaksanaan program Mas JOS. Dilakukan dengan wawancara kepada informan pelaksana.
			Ketersedian informasi pelaksanaan Mas JOS yang dapat diakses oleh pelaksana melalui media <i>Jogja Smart Services (JSS)</i> , <i>masjos.id</i> , <i>flyer</i> , dan media komunikasi <i>WhatsApp</i> . Dilakukan dengan wawancara kepada informan pelaksana.
		Disposisi (Sikap Pelaksana)	Tingkat kognisi dan motivasi pelaksana Program Mas JOS yaitu DLH Kota Yogyakarta, MPP Kemantren Umblharjo, dan pelaksana wilayah yang mendukung tujuan dari program Mas JOS. Dilakukan dengan wawancara kepada informan pelaksana.

Variabel	Konsep	Aspek	Operasionalisasi
			Profesionalisme dan kesesuaian tindakan dari DLH Kota Yogyakarta, MPP Kemantren Umbulharjo, dan pelaksana wilayah sebagai pelaksana terhadap tujuan kebijakan yang terlaksana di Kemantren Umbulharjo. Dilakukan dengan wawancara kepada informan pelaksana.
		Struktur Birokrasi	Kejelasan fragmentasi tugas antar instansi dalam implementasi Program Mas JOS yang dilaksanakan di Kemantren Umbulharjo yang sesuai dengan penugasan dalam Surat Edaran Walikota Yogyakarta tahun 2025 tentang Mas JOS. Dilakukan dengan wawancara kepada informan pelaksana dan kajian data.
			Koordinasi antar instansi DLH Kota Yogyakarta, MPP Kemantren Umbulharjo, dan pelaksana wilayah yang terlibat dalam pelaksanaan Program Mas JOS di kemantren Umbulharjo. Dilakukan dengan wawancara kepada informan pelaksana.
			Prosedur operasional standar terkait pelaksanaan intruksi oleh OPD kemantren dan lurah serta mekanisme pelaporan oleh Kader Mas JOS yang dilaksanakan dalam Program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo. Dilakukan dengan wawancara kepada informan pelaksana dan observasi.

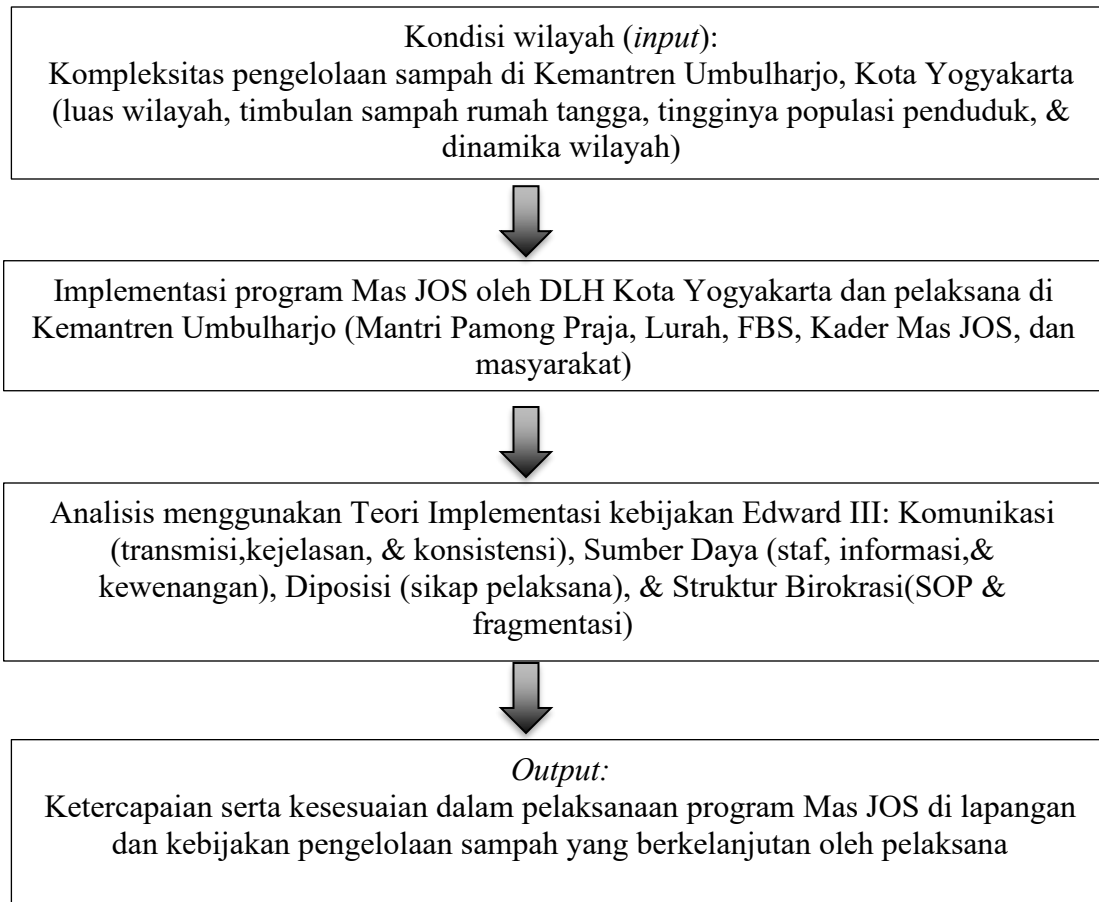
Sumber: Hasil olah penulis, 2026

Tabel 1.2 di atas menyajikan paparan operasionalisasi konsep yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Kerangka analisis dibangun dari tiga variabel utama, yaitu

kebijakan publik, siklus kebijakan, dan implementasi kebijakan. Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) diposisikan sebagai produk kebijakan publik yang saat ini berada pada tahap implementasi dalam siklus kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Selanjutnya, efektivitas pelaksanaan program di Kemantren Umbulharjo dibedah menggunakan teori George C. Edward III yang mencakup empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

1.7 Kerangka Berpikir

Bagan 1.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Hasil olah peneliti, 2026

Kerangka berpikir pada Bagan 1.1 berfungsi sebagai alur logika yang konseptual dalam melakukan penelitian implementasi program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo. *Input* dalam penelitian ini di rekognisi sebagai karakter wilayah yang sudah ada dan berjalan. Karakter tersebut meliputi lokus pelaksanaan program yaitu di Kemantren Umbulharjo yang memiliki kompleksitas luas wilayah, timbulan sampah rumah tangga, tingginya populasi penduduk, & dinamika wilayah sebagai indikator yang sudah ada. Lalu *input* tersebut difokuskan kepada gejala yang ada yaitu pada

objek implementasi program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo yaitu pelaksana DLH Kota Yogyakarta, Pemerintah Kemantren Umbulharjo, Kelurahan di Kemantren Umbulharjo, dan pelaksana di wilayah yaitu Forum Bank Sampah, Kader Mas JOS(kader pelaporan & pengembangan, PKK RW, dan RT) dengan menggunakan instrumen dalam teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Capaian yang digali dari proses implemetasi program Mas JOS adalah aspek implementasi yang sudah dijalankan secara efektif oleh pelaksana. Pada prespektif jangka panjang menggali kondisi ideal dari implemetasi pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini berlandaskan pada filsafat positivisme dan dirancang untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terbebas dari nilai dalam penelitian yang dilakukan di lapangan. Hasil penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna daripada pencapaian generalisasi. Makna ini merujuk pada data yang sesungguhnya, yaitu nilai yang tersembunyi di balik data yang tampak. Data tersebut dibentuk menjadi suatu gambaran implementasi kebijakan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai karakteristik atau sifat dari suatu keadaan, perilaku individu maupun kelompok.⁴⁹ Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini berupaya

⁴⁹ Sumardjono, M. S. (2001). Pedoman pembuatan usulan penelitian sebuah panduan Dasar. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*. Hlm 16

memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

1.8.2 Situs penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Program Mas JOS yang sudah dilaksanakan sejak awal bulan Agustus 2025 termasuk di Kemantren Umbulharjo. Untuk memperoleh data pelaksanaan program tersebut, penelitian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Dilakukan dengan proses wawancara kepada informan yaitu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai koordinator penyampaian informasi dan pelaksanaan, Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di kemantren, Lurah sebagai pelaksana teknis utama di tingkat kelurahan, LSM Shind sebagai mitra sekaligus pihak ketiga dalam pelaksanaan Mas JOS di Kota Yogyakarta, Kader Mas JOS sebagai pelaksana pelaporan dan pengembangan di tingkat kelurahan, dan masyarakat sebagai pelaksana di tingkat paling bawah di Kemantren Umbulharjo.

b. Observasi

Dengan mengamati dan menganalisis implementasi program Mas JOS di lingkungan Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Perolehan data melalui dokumentasi digital dengan rekaman suara, foto, dan video maupun dokumentasi dalam *database* DLH Kota Yogyakarta.

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif. Data kualitatif deskriptif diperoleh melalui teknik pengumpulan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, data juga dapat berupa transkrip wawancara, gambar, rekaman suara, foto atau video.

Sumber utama data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari informan, sedangkan data tambahan, seperti foto, dokumen, dan sebagainya, berfungsi sebagai data sekunder.⁵⁰ Data penelitian ini menjadi bahan utama untuk mengidentifikasi implementasi Program Mas JOS pada pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan kombinasi dua teknik sampling non-probabilitas (*non-probability sampling*) secara sekuensial, yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*.⁵¹ Tahap pertama dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan kunci berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan peneliti.⁵² Kriteria utama dalam penelitian ini adalah aktor yang dijabarkan dalam Surat Edaran Walikota Kota Yogyakarta tahun 2025 tentang Mas JOS.

Tahap kedua menggunakan teknik *snowball sampling* untuk memperluas jangkauan sumber data. Teknik ini dilakukan dengan meminta informan awal merekomendasikan aktor lain yang terlibat langsung dalam dinamika program Mas JOS di lapangan (seperti kader penggerak atau warga setempat).⁵³ Rantai rekomendasi

⁵⁰ Lexy J. Moleong. (2004). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya. hlm 157

⁵¹ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.

⁵² Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

⁵³ Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

informan ini akan terus bergulir dan baru dihentikan secara sadar oleh peneliti apabila telah mencapai titik jenuh data (data saturation).⁵⁴

Selain mengoptimalkan kedalaman informasi, kombinasi kedua teknik sampling ini secara metodologis sengaja diterapkan untuk menunjang uji keabsahan data pada aspek *confirmability* (objektivitas). Melalui penelusuran dari informan kunci (*purposive*) ke informan lapangan (*snowball*), peneliti dapat melakukan verifikasi silang (triangulasi sumber) sekaligus membangun kualitas data yang transparan dan sesuai fakta yang ada guna memastikan bahwa hasil analisis benar-benar bersumber dari data lapangan yang objektif dan terhindar dari subjektivitas peneliti.

Jenis data dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya.⁵⁵ Data ini dikumpulkan langsung di lapangan melalui metode wawancara kepada informan yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang berdasarkan SE Walikota tentang Mas JOS tahun 2025 bertugas sebagai koordinator penyampaian informasi dan pelaksanaan, Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di kemantren, Lurah sebagai pelaksana teknis utama di tingkat kelurahan, LSM Shind sebagai mitra sekaligus pihak ketiga dalam pelaksanaan Mas JOS di Kota Yogyakarta, Kader Mas JOS sebagai pelaksana pelaporan dan pengembangan di tingkat kelurahan, dan masyarakat sebagai pelaksana di tingkat paling bawah di Kemantren Umbulharjo.

⁵⁴ Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., & Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: Clarifying its meaning and operationalization. *Quality & Quantity*, 52(4), 1893–1907. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0574-8>

⁵⁵ Bagja Waluya. (2007). *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber kedua, seperti catatan dalam observasi maupun dalam bentuk buku, buletin, atau majalah yang bersifat dokumentasi.

Sumber data sekunder dapat berupa:

1. Kepustakaan (laporan, buku, dan penelitian ilmiah)
2. Data digital dalam *website*, berita, laporan pers, dan publikasi DLH

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam karya tulis ilmiah harus dilakukan sesuai proses dan teknik yang metodologis. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting yang bertujuan untuk memperoleh data yang memenuhi standar data yang diterapkan.⁵⁶

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dan jawaban yang diberikan oleh responden dicatat atau direkam menggunakan alat perekam.⁵⁷ Wawancara dilakukan dalam bentuk interaksi antara peneliti dan informan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang

⁵⁶ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 224

⁵⁷ Nurbuko, C., & Achmadi, A. (2007). *Metodologi Penelitian* (Cet. VIII). Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm 70.

valid dari *stakeholder* pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kemantren Umbulharjo.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang bersifat terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti sudah mengetahui dengan jelas informasi yang ingin diperoleh.⁵⁸ Dalam wawancara ini, penulis telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dalam panduan wawancara. Pertanyaan dalam panduan wawancara akan diklasifikasikan sesuai identitas yang direpresntasikan oleh informan, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Mantri Pamong Praja (MPP) Kemantren Umbulharjo, Lurah Kelurahan Sorosutan, Lurah Kelurahan Muja-Muju, Lurah Kelurahan Giwangan, Ketua FBS Kota Yogyakarta, Direktur Bank Sampah Masdarling Muja Muju, perwakilan Kader Mas JOS tim pelaporan, LSM Secerah Harapan Indonesia Jogja (SHIND), dan masyarakat Kemantren Umbulharjo..

Setiap informan akan diberikan pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator dalam teori Implementasi Kebijakan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti melakukan dokumentasi jawaban yang diberikan, baik dalam bentuk catatan, rekaman suara, foto dan video.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Observasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan menekankan pada ketelitian dan kecermatan.

⁵⁸ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 233.

Observasi didukung dengan alat bantu, yaitu daftar catatan, alat perekam elektronik, kamera, dan perangkat lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁵⁹

Observasi dilakukan sebagai metode untuk mengamati implementasi program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo. Pengamatan meliputi proses memahami dan merekognisi penyelesaian isu pengelolaan sampah dalam program Mas JOS secara visual terhadap kondisi di lingkungan kemantren. Data yang diperoleh dalam proses observasi digunakan sebagai data sekunder untuk mendukung keberlanjutan penelitian. Data observasi juga dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengidentifikasi data primer tambahan yang diperlukan untuk menganalisis implementasi program Mas JOS secara komprehensif.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian merupakan data mentah yang diolah melalui serangkaian teknik untuk memperoleh hasil penelitian. Teknik analisis data merupakan metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi lebih jelas dan dapat dipahami. Hal ini diperlukan untuk mencari solusi yang tepat dalam sebuah permasalahan.⁶⁰ Berikut ini adalah metode analisis data dalam penelitian implementasi program Mas JOS yang dilakukan di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

1.8.5.1 Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan untuk mencegah adanya bias informasi dari data yang diperoleh dalam penelitian. Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang penting, dan memfokuskan pada elemen-elemen utama,

⁵⁹ Dewi Sadiyah. (2015). *Metode Penelitian Dakwah: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 87.

⁶⁰ Suryabrata, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 38.

beriringan dengan identifikasi gagasan-gagasan dan pola yang muncul.⁶¹ Reduksi data juga dilakukan dengan penyusunan tabel yang memungkinkan pemetaan, klasifikasi, penandaan atau pengkodean pada aspek-aspek pelaksanaan program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo.

1.8.5.2 Uji Kualitas Data

Data dalam penelitian implementasi program Mas JOS di kemantren Umbulharjo merupakan data kualitatif yang menjadi dasar pengetahuan dalam penelitian. Pemeriksaan keabsahan data berfungsi untuk menanggapi asumsi bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, tetapi juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari intelektualitas dalam penelitian kualitatif.⁶² Tujuan dari keabsahan data adalah untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar memenuhi kriteria ilmiah dan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.⁶³

Untuk memastikan bahwa data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability*.⁶⁴

A. Uji kredibilitas

⁶¹ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 247.

⁶² Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

⁶³ Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁶⁴ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 270.

Uji kredibilitas bertujuan untuk menguji sejauh mana data hasil penelitian dapat dipercaya dan tidak meragukan sebagai karya ilmiah. Metode dalam uji kredibilitas dilakukan melalui beberapa cara:

a. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap awal, ketika peneliti mulai melakukan penelitian di lapangan, peneliti masih dianggap sebagai individu asing dan dicurigai, sehingga informasi yang diberikan seringkali tidak lengkap, tidak mendalam, dan mungkin ada yang disembunyikan. Seiring berjalannya waktu dan dengan perpanjangan pengamatan, peneliti melakukan verifikasi ulang terhadap keakuratan data yang telah diperoleh. Apabila data yang telah dikumpulkan ternyata tidak valid setelah dibandingkan dengan sumber data asli atau sumber lain, peneliti akan melakukan pengamatan yang lebih luas dan mendalam untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh.⁶⁵

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan terus-menerus. Dengan pendekatan ini, data dan urutan peristiwa dapat direkam dengan lebih akurat dan terorganisir secara sistematis.⁶⁶

c. Triangulasi

⁶⁵ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 271.

⁶⁶ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 272

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai proses pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pada waktu yang berbeda.⁶⁷

d. Menggunakan bahan referensi

Referensi merujuk pada sumber pendukung yang digunakan untuk membuktikan kebenaran data yang telah diperoleh oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data yang disajikan dilengkapi dengan foto atau dokumen autentik agar lebih meyakinkan dan dapat dipercaya.⁶⁸

e. Mengadakan *member check*

Tujuan dari *member check* adalah untuk memastikan sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang diberikan oleh sumber data. Dengan demikian, *member check* bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam penulisan laporan benar-benar mencerminkan maksud dari sumber data atau informan.⁶⁹

B. *Transferability*

Transferability dalam penelitian kualitatif ini merujuk pada validitas eksternal, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau relevan dengan konteks lain di luar populasi atau sampel penelitian.⁷⁰ Pertanyaan terkait nilai transferabilitas berfokus pada kemungkinan penerapan hasil penelitian dalam situasi yang berbeda. Bagi peneliti, tingkat transferabilitas sangat bergantung pada pengguna hasil

⁶⁷ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 273

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 276.

⁷⁰ Ibid.

penelitian. Jika hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda, maka validitas nilai transferabilitasnya tetap dapat dipertanggungjawabkan.

C. Dependabilitas

Reliabilitas atau kepercayaan terhadap suatu penelitian, mengacu pada konsistensi hasil penelitian yang diperoleh melalui beberapa percobaan yang menghasilkan temuan serupa. Penelitian yang memiliki *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian yang, jika dilakukan oleh orang lain dengan mengikuti proses yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian. Audit ini dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing yang tidak terlibat langsung, untuk menilai seluruh aktivitas yang dilakukan selama penelitian. Proses audit meliputi tahapan seperti penentuan masalah, pengumpulan data di lapangan, pemilihan sumber data, analisis data, pengujian keabsahan data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian.⁷¹

D. *Confirmability*

Objektivitas dalam pengujian kualitatif dikenal juga sebagai uji *confirmability*. Hasil dari penelitian ini dikonfirmasi langsung oleh pelaksana yaitu Pemerintah Kemantren Umbulharjo melalui mekanisme pelaporan penelitian yang dilakukan di wilayahnya. Pada konteks penelitian kualitatif terhadap implementasi program Mas JOS di Umbulharjo, uji *confirmability* dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian dengan proses pelaksanaan program. Hasil penelitian ini merupakan refleksi langsung dari proses penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian ini memenuhi standar *confirmability*.⁷²

⁷¹ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 277.

⁷² Ibid.

1.8.5.3 Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa teks naratif, tabel, bagan, hubungan antar kategori, atau bentuk lainnya. Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan, "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text,*" yang berarti teks naratif adalah bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan menyajikan data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang terjadi dan memperoleh vision dari program Mas JOS berdasarkan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, selain teks naratif, penyajian data juga bisa dilakukan dengan grafik, matriks, jaringan (network), dan diagram.⁷³

1.8.5.4 Analisis Data

Data penelitian implementasi program Mas JOS yang diperoleh di Kemantren Umbulharjo dari informan, diolah melalui proses analisis data. Kegiatan analisis data mencakup beberapa langkah, antara lain: menentukan fokus informasi terkait pelaksanaan program; menyusun temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul; merencanakan langkah pengumpulan data berikutnya; serta menetapkan sasaran pengumpulan data untuk mendukung validasi data; seperti informasi, situasi, dan dokumen tambahan.⁷⁴

1.8.5.5 Conclusion Drawing

Conclusion drawing atau disebut penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penguraian temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan

⁷³ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 249.

⁷⁴ Suryabrata, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 39.

memiliki bentuk berupa deskripsi dan gambaran mengenai objek yang sebelumnya tidak jelas hingga diperoleh kepastian data. Temuan juga berbentuk hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.⁷⁵ Peneliti menjabarkan temuan baru dalam pelaksanaan program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo pada *conclusion drawing*. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

⁷⁵ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 253.